TANGKAL HOAKS, KEMENKO POLHUKAM GANDENG PERUM LKBN ANTARA

Direktur Utama Perum LBKN ANTARA Meidyatama Suryodiningrat (kanan) dan Sesmenko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandono memperlihatkan dokumen MoU kerja sama bidang pemberitaan yang baru saja diteken, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/12). (ANTARA FOTO/Zuhdiar Laeis)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggandeng Perum LKBN ANTARA untuk bekerja sama dalam bidang pemberitaan, terutama untuk menangkal maraknya hoaks.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dilakukan antara Sesmenko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandono dan Direktur Utama Perum LBKN ANTARA Meidyatama Suryodiningrat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/12).

Dalam acara tersebut, hadir pula Sekretaris Perusahaan Perum LKBN ANTARA Iswahyuni dan CEO PT IMQ Multimedia Utama, Darmadi. Sementara itu, dari Kemenko Polhukam hadir sejumlah deputi.

Meidyatama selaku Dirut Perum LKBN ANTARA menyampaikan kerja sama itu sebagai langkah untuk membentengi dan melawan dari informasi-informasi yang bersifat hoaks, kurang tepat, maupun fitnah.

Secara lebih spesifik, kata Dimas, sapaan akrab Meidyatama, kerja sama itu berkaitan dengan program i-Media (indoor media), yakni penayangan konten berita dan kabar pembangunan di tempat-tempat publik.

Kerja sama tersebut akan ditangani oleh PT IMQ Multimedia Utama selaku anak perusahaan Perum LKBN ANTARA.

"Bicara digital, persaingan banyak sekali. Public space harus kita isi. Saat ini, sudah terpasang di semua kementerian. Kemudian, Indomaret ada televisi (i-Media Antara) itu. Setiap jam, lima menit sekali berita ANTARA yang mengisi," paparnya.

Selain itu, sebanyak 200 pemerintah kabupaten/kota juga sudah bekerja sama untuk penayangan konten tersebut meski baru di 50 pemkab/pemkot yang sudah terpasang fasilitasnya.

"Dengan kerja sama yang dilakukan awal tahun, kami yakin kementerian bisa mendayagunakan kami secara lebih lanjut untuk menyebarkan berita-berita yang dibutuhkan masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Sesmenko Polhukam Tri Soewandono mengakui perkembangan teknologi yang kian pesat mendorong penyebaran informasi secara lebih masif, terutama melalui media sosial yang berimplikasi positif maupun negatif.

"Gencarnya medsos berdampak positif maupun negatif. Seperti masa-masa Pilpres kemarin, kan banyak dampak negatifnya. Dengan demikian, harapannya ANTARA bisa membantu penyebaran informasi secara valid, bukan hoaks," ujarnya berharap.

Kemenko Polhukam berharap dengan adanya kontra narasi terhadap hoaks dapat membantu mengoptimalkan program-program yang selama ini dijalankan.

"Kemenko Polhukam adalah ujung tombak permasalahan di Indonesia menyangkut politik, hukum, dan keamanan. Karena itu, masyarakat perlu diberikan informasi, pencerahan, pengetahuan supaya tidak salah persepsi," tutur Soewandono.

Pewarta: Zuhdiar Laeis

Editor: Ami/Arie/Sekretariat Perusahaan